

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN
PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

INDIRA JAMAL

11000117052

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indira Jamal

NIM : 11000117052

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar / 06 Juni 1998

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : BTN Ranggong Permai Blok A11 No. 11A, Makassar

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 8 Juli 2021

Penyusun



Indira Jamal

11000117052

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata**”, yang ditulis oleh Indira Jamal, NIM: 11000117052, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 08 Juli 2021 bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

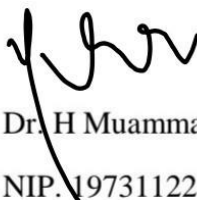
Makassar, 08 Juli 2021 M

27 Zulkaidah 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	(.....)
Munaqisy 1	: Dr. Nur Taufiq Sanusi, M. Ag	(.....)
Munaqisy 2	: Erlina, S.H., M. H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag
NIP. 19731122 20012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan judul : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata*”. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa rintangan, namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penyusun jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penelitian skripsi ini, Dari lubuk hati penyusun yang paling dalam dikhaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua saya, Ibundaku tercinta **Halima** dan Ayahanda **Jamaluddin** atas doa, dukungan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tiada hentinya, yang akan mengantarkan penyusun pada kesuksesan. Semua kesuksesan yang telah penyusun raih dan Insya Allah akan kupersembahkan untuk kalian.
2. **Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. **Bapak Dr. H Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
4. **Bapak Ashar Sinilele, S.H., M.H**, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan **Bapak Muhammad Anis, S.Ag., M.H**, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi. Serta selaku Staf Jurusan, yang telah membantu proses administrasi selama pengurusan di semester akhir.
5. **Bapak Muhammad Anis, S.Ag., M.H**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang sering memberikan nasihat, saran, serta waktu yang diberikan membahas mengenai perkuliahan dari awal semester sampai diakhir semester.
6. **Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.H.I**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Hj. Halimah B, M.Ag**, selaku Pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun hingga rampungnya penyusunan skripsi ini.
7. **Bapak Dr. Nur Taufiq Sanusi, M. Ag**, selaku Penguji 1 dan **Ibu Erlina, S.H., M. H** selaku penguji 2, terima kasih atas semua masukan ilmu yang berharga untuk penyusun.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak berjasa mendidik penyusunan sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Saudaraku **Indah Fajar Wati, Ilham Syukur**, dan **Ibnu Hamid**, memberikan doa kesuksesan dan kebahagiaan tiada hentinya untuk saya.
11. Teman hidup ku yang paling setia, **Muh. Solihin (Olic)**, yang selama ini sangat setia membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan ku **Andi Ayu Pratiwi N.Z (Ayu)**, dan **Tiara Apricilli (Cindy)**, yang selama ini menjadi tempat berbagi suka dan duka ku.

13. Seluruh teman kelas ku **HES B 2017**, yang senantiasa mencurahkan doanya hingga mencapai kesuksesan ini.
14. Segenap keluarga besar mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya. Penulis berharap dengan kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat umum, serta untuk penulis sendiri.

Akhir kata ***Alhamdulillah Rabbil Alamin***

Makassar, 8 Juli 2021



Indira Jamal

11000117052



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Pembahasan	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	10
G. Tujuan Dan Kegunaan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	12-30
A. Jual Beli.....	12
B. Jual Beli Online	18
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE	31-50
A. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam	31
B. Hukum Jual Beli Online	40
C. Syarat Jual Beli Online Menurut Hukum Islam	47
D. Langkah-Langkah Jual Beli Online Menurut Hukum Islam	47
E. Keharaman Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.....	49
BAB IV ANALISIS SYARAT KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN PASAL 1320 KUH PERDATA.....	51-68
A. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam	51
B. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Pasal 1320 KUH Perdata	55
C. Perbandingan Syarat Keabsahan Jual Beli Online Terhadap Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Pasal 1320 KUH Perdata	65

BAB 5 PENUTUP.....	69-70
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71-76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	a

ـَ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.. يَ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf (س) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafī ilaihi* (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahūwata, ālā</i>
saw.	: <i>sallallāhu „alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>„alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
Qs .../...:4	: QS An-Nisa/4:58
HR	: Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Indira Jamal
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 11000117052
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam transaksi jual beli online, 2) untuk mengkaji perbandingan syarat keabsahan jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1320 KUH Perdata.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku, undang-undang, kitab fiqh, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis normative. Sumber primer Fiqih Mumalah & KUH Perdata dalam pasal 1320, sumber sekunder buku, jurnal, skripsi, situs internet yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis, kemudian menguraikan data, dan pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online diperbolehkan dalam Hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai yang diatur dalam QS al-Baqarah/2 : 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Para ulama pun sepakat menghalalkan transaksi ini jika tidak mengandung *gharar* didalamnya. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu *tamyiz* dan di dalam KUH Perdata yaitu kecakapan hukum. Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan *urf*, dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung *gharar* atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut. 2) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat perjanjian menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam, pelaksanaan transaksi jual beli online sama dengan transaksi *bai' al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Maka untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat-syarat sah *bai' al-salam*. Pelaksanaan *bai' al-salam* dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan uang dimuka, dan penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Namun, pada jual beli online pelaku transaksi jual beli tidak saling bertemu dan penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang seperti via JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) dan Pos.¹

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah saw sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip Muslehuddin, Hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan baik yang berasal aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn/af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dalam kepatuhan serta juga bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wasalamatan* yang memiliki selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).²

¹ Nurmasyithahziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”, *Petita* 2 no 1 (2017), h. 107.

² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Arab* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), h. 2.

Prinsipnya Islam berfungsi sosial dan jika dipandang dari sisi muamalah, hubungan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi dengan kata lain, pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, dan rasa kemanusiaan. Dalam praktek perekonomian tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal tetapi yang ditekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak agar terhindar dari cara memperoleh harta dengan cara yang tidak halal agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perekonomian.³

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan atau jual beli yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam ajaran Islam jual beli dasar hukumnya boleh atau mubah selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Transaksi jual beli online juga harus berasaskan sukarela antara kedua belah pihak yaitu tanpa adanya unsur paksaan dan dinyatakan sah secara hukum.

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Sebab dihalalkannya jual beli adalah dikarenakan dalam transaksi jual beli terlaksananya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba dikarenakan didalam riba terjadi pengambilan hak berupa harta orang lain tanpa ada imbalan yang sesuai. Menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi.⁴ Sebagaimana didalam QS. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

³ Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", El-Iqtishady 2, no. 1 (2020): h. 162.

⁴ Mahmudah Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", El-Istiqhady 2 no. 2 (2020), h. 75

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵

Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Namun ketika kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Dengan demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online yang banyak terjadi di zaman sekarang ini.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara anatomis, merupakan salah satu bidang dalam syariat Islam, yakni bidang muamalah. Bidang muamalah memiliki cakupan yang begitu luas mencakup segala hubungan interaktif semua makhluk Tuhan di bumi yang menempatkan manusia sebagai aktor utama (khalifah). Bidang ekonomi merupakan salah satu di antaranya yang khusus membahas interaksional antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan materi dan jasa dalam rangka kesejahteraan mereka di bawah tuntunan syariah.⁶

Perbankan syariah tidak memungkinkan terjadinya tindak pidana, karena perbankan syariah lahir karena tuntunan dan tuntutan moral keagamaan berasaskan Quran dan hadis, untuk melahirkan sistem pengelolaan keuangan yang akan memakmurkan, menyejahterakan dengan prinsip-prinsip dan tujuan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, tolong menolong dan sebagainya.⁷

Perkembangan dunia dari zaman dahulu hingga sekarang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama pada bidang ekonomi khususnya jual beli. Di mana ketika zaman dahulu seseorang membeli barang dengan cara bertatap muka antara konsumen dan produsen. Sedangkan di zaman sekarang atau yang lebih dikenal dengan zaman modern semua

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2012), h. 58.

⁶ Abdi Wijaya, "*Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)*", *Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): h. 133.

⁷ Hamsir, "*Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah Dan Konvensional*", *El-Istiqhady* 2, no. 2 (2020): h. 83.

terasa lebih mudah karena teknologi yang makin canggih sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktivitas tidak luput pula dalam kegiatan jual beli. Di mana dalam proses kegiatan jual beli di zaman modern sekarang ini sudah tidak perlu bertemu dan bertatap muka, dikarenakan teknologi yang berkembang dengan pesat. Hal inilah yang kemudian dibawah dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang dikenal dengan transaksi online (jual beli online).

Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online. Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Transaksi jual beli online berkembang dimasyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.⁸

Jual beli online adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Dengan berkembangnya zaman, perkembangan jual beli pun semakin canggih, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Dewasa ini banyak pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi jual-beli melalui online. Media yang digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi online antara lain, yaitu : lazada, forum jual-beli kaskus, olx, berniaga. Faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan transaksi online karena melalui transaksi online pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya.⁹

Dengan adanya perjanjian dan persetujuan menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang diadakan telah sepakat tentang apa yang meraka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak

⁸ Rifan Adi Nugraha dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online", *Serambi Hukum* 08, no. 02 (2014), h. 91.

⁹Rifan Adi Nugraha dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online", *Serambi Hukum* 08, no. 02 (2014), h. 92.

dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.¹⁰

Faktor yang mendorong konsumen melakukan transaksi jual beli online karena melalui transaksi tersebut konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen.

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan internet.¹¹

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Online shop biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Namun ada juga dampak negatif dari kegiatan jual beli online seperti, adanya penipuan dalam melakukan transaksi yakni barang tidak dikirim, barang yang dipesan tidak sesuai dari awal pemesanan yang tersedia pada toko online tersebut.

Maraknya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan pada transaksi jual beli online yang seharusnya diperhatikan sebelum melakukan transaksi tersebut. Di dalam jual beli terdapat adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen. Pada pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi persyaratan syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang sah. Apabila dipenuhi empat syarat

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat) Jilid Ketiga* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 55

¹¹ Sofyan AP. Kau, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet" *Al- Mizan* 3, no. 1 Desember (2007): h. 1.

sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satunya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

Dengan telah dikeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi online, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui online untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajibannya yang dimiliki. Dan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam transaksi jual beli online?
2. Bagaimana perbandingan syarat keabsahan jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1320 KUH Perdata?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan yang menjadi topik dalam judul, yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata”. Dari judul tersebut penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain :

“Hukum Islam” adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. Hukum Islam tidak boleh dipisahkan antara iman, akhlak, dan syariah. Ketiga hal ini adalah

¹² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 1-2.

ajaran Islam yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum Islam oleh seorang muslim.¹³ Didalam Hukum Islam kegiatan muamalah (ekonomi) merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan untuk memenuhi hidup, karena jual beli itu halal jika pelaksanaan transaksi jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat serta pintu rezeki itu akan dapat di buka melalui jalan perdagangan (jual beli).

“Jual Beli Online” adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan, yang dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, hanya menggunakan handphone dengan melalui via online seperti chat, telepon, sms, dan lain sebagainya.¹⁴

“KUH Perdata” adalah sekumpulan ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum private karena mengatur kepentingan perseorangan. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Jadi definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata.

D. Kajian Pustaka

Untuk lebih jelasnya sebuah penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya proposal ini. Rujukan buku-buku atau referensi lainnya yang ada kaitannya dengan judul ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mencari beberapa referensi, penulis menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, yaitu :

1. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Dalam buku ini membahas secara perinci dan lengkap perihal aturan hukum dalam syariat Islam yang berkaitan langsung dengan amalan atau muamalah (ekonomi) yang khususnya membahas salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli dalam Islam yang secara lengkap dibahas dalam buku ini. Sedangkan didalam penelitian ini akan membahas jual beli tetapi jual beli tersebut terkhusus kepada jual beli online yang ditinjau dalam hukum Islam dengan penerapan pasal 1320 KUH Perdata.¹⁵
2. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata*

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 14.

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2017), h. 113.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001).

(BW), *Hukum Islam Dan Hukum Adat*) Jilid Ketiga. Dalam buku ini membahas Hukum Keperdataan dalam perspektif KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat, yang salah satunya membahas mengenai syarat-syarat perjanjian KUH Perdata terkhusus kepada perjanjian jual beli yang dibahas secara lengkap. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas jual beli tetapi jual beli yang dimaksud tersebut adalah ditinjau dalam Hukum Islam, dan penerapan pasal 1320 KUH Perdata.¹⁶

3. Tira Nur Fitria, Jual beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 03 no. 01, 2017. Dalam jurnal ini membahas seluruh inti dari jual beli online, yang didalamnya dibahas jual beli di zaman Rasulullah, jual beli online, perkembangan bisnis online di Indonesia, serta kelebihan dan kekurangan jual beli online yang ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas jual beli online yang ditinjau dalam Hukum Islam dengan penerapan pasal 1320 KUH Perdata saja.¹⁷
4. Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *al-Daulah*, vol 6 no. 2, 2017. Dalam jurnal ini membahas jual beli, jual beli akad salam secara online (e-commerce) yang didalamnya membahas keseluruhan yang berhubungan dengan jual beli yang menurut dengan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas jual beli, jual beli online menurut hukum Islam dan KUH Perdata.¹⁸
5. Disa Nusia Nisrina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, 2015, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi ini membahas jual beli online dan relevansi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana di dalam skripsi tersebut berfokus kepada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online yang membahas seluruh aturan-aturan yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas jual beli online yang ditinjau dari Hukum Islam dengan disertai penerapan pada pasal 1320

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat) Jilid Ketiga* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

¹⁷ Tira Nurfitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017).

¹⁸ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah* 6 no. 2 (2017).

KUH Perdata.¹⁹

Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli online, baik berupa buku jurnal, tulisan dan skripsi, sejauh ini belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai jual beli online dalam hukum Islam dengan penerapan pasal 1320 KUH Perdata.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fiqih, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.²⁰

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan, seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative (syar'i) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang terkait dengan jual beli.

Pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana keabsahan serta syarat perjanjian jual beli online dalam KUH Perdata.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam

¹⁹ Disa Nusia Nisrina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar).

²⁰ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama objek penelitian dilakukan yaitu Buku tentang Fiqh Muamalah, dan KUH Perdata dalam pasal 1320

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah, Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, skripsi, situs internet yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, skripsi), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam proposal ini.

Analisis data yang digunakan dengan cara deduksi. Deduksi adalah proses penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi dikarenakan pernyataan yang diajukan untuk mencapai kesimpulan yang khusus dan harus didasari oleh pernyataan yang benar dan valid.

G. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam transaksi jual beli online.
- b. Untuk mengetahui perbandingan syarat keabsahan terhadap jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1320 KUH Perdata.

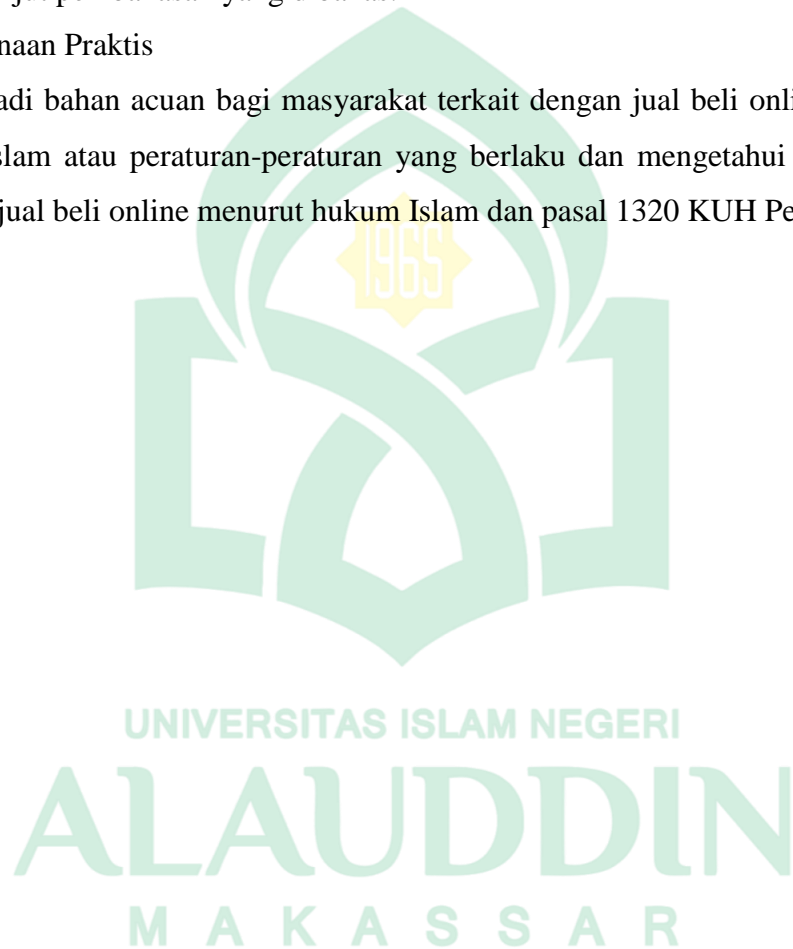
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah pengetahuan hukum Islam dan hukum perdata khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer dan hukum kekayaan dalam perjanjian jual beli
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pembahasan yang dibahas.

b. Kegunaan Praktis

Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli online sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dan mengetahui syarat keabsahan terhadap jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1320 KUH Perdata.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual Beli

Wirjono Prodjodikoro mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.¹

Menurut Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.²

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka atau memindahkan milik dengan mendapatkan pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang tersebut beserta harganya, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁴

Definisi tersebut ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (en eigendom te leveren) dan menjaminnya (vrijwaren) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnya, serta membayar harga.⁵

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: PT Sumur, 1991), h. 17.

² R. M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1996), h. 14.

³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqh Wanita* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 490

⁴ Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 356.

⁵ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 48.

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.⁷

Dari pengertian-pengertian dapat disimpulkan jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Sedangkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persetujuan jual beli paling tidak mengandung unsur :

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.
Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar Hukum jual beli menurut KUH Perdata diatur mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540, termasuk dalam hal jual beli perusahaan (jual beli menurut KUH Dagang).⁸

3. Subjek dan Objek Jual beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu penjual dan pembeli dengan syarat sebagaimana

⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Praditya Paramita, 1983). H. 327.

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 1.

⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 100.

yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.⁹

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu namun untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Bentuk perjanjian jual beli ada 2 yaitu :¹⁰

- a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan di mana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
- b. Tulisan, yaitu perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta dibawah tangan.

5. Risiko Dalam Jual Beli

Menurut Subekti yang dimaksudkan dengan risiko dalam perjanjian jual beli adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan satu pihak. Ada tiga ketentuan mengenai risiko dalam perjanjian jual beli, yaitu:¹¹

- a. Barang Telah Ditentukan

Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.

Mengenai barang yang telah ditentukan Pasal 1460 KUH Perdata menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan

Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata ini tampaknya tidak sinkron karena selayaknya yang bertanggung jawab adalah penjual. Pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut (karena barangnya belum diserahkan) akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Logikanya si pembeli dikatakan resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan objek terhadap si pembeli, baru layak dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi karena barang tersebut. Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 102.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 108.

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 26-28.

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Menurut subekti Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan Pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.

b. Barang Tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu, dalam hal ini risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.

c. Barang yang Dijual Berdasarkan Timbangan, Ukuran, atau Jumlah

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelum dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran. Setelah dilakukan penimbangan, perhitungan, atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, perhitungan, atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 KUH Perdata.

6. Hak dan Kewajiban dalam Suatu Jual Beli

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli :

a. Kewajiban Penjual

Ada 2 kewajiban utama dari pihak penjual, yaitu :¹²

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli.

Sehubungan dengan adanya berbagai jenis barang/benda bergerak atau tidak bergerak, maka cara penyerahannya pun berbeda pula. Sudah dikemukakan dalam jilid kedua buku ini bahwa cara penyerahan dari masing-masing adalah sebagai

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 9.

berikut

- a) Untuk barang bergerak yang berwujud, penyerahannya dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 612 KUH Perdata.
 - b) Penyerahan benda bergerak tidak bertubuh, dilakukan sesuai dengan jenis bendanya yaitu piutang tanpa nama atau atas tunjuk seperti cek dilakukan dengan penyerahan nyata, dan piutang atas nama seperti gadai dilakukan dengan *cessi* yaitu dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan.
 - c) Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan penyerahan yuridis, yaitu dengan “balik nama” dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Misalnya untuk “tanah” dilakukan balik nama di Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - d) Benda tidak bergerak tidak berwujud, penyerahannya dilakukan dengan “*cessi*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 613 KUH Perdata.
- 2) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung atas cacat-cacat tersembunyi.
- a) Menanggung kenikmatan tentram atas barang, maksudnya adalah penjual harus menanggung bahwa pihak pembeli terbebas dari gangguan pihak ketiga dalam menikmati atau memanfaatkan barang atau benda yang dibelinya. Pihak ketiga yang dimaksudnya contohnya: pemegang hipotek (tempat atau pihak dimana barang atau benda tersebut dihipotekkan), atau pemegang gadai. Jadi dengan demikian barang atau benda yang dijadikan objek jual beli bukanlah barang atau benda yang sudah atau sedang dihipotekkan atau digadaikan.
 - b) Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat yang tersembunyi maksudnya adalah cacat-cacat yang membuat benda atau barang objek jual beli tersebut menjadi tidak dapat dipakai untuk keperluannya, sehingga mengurangi pemakaiannya. Misalnya sepeda motor, karena adanya cacat yang tersembunyi membuat si pembeli jadi begitu “puas” mempergunakan sepeda motor tersebut.
- b. Kewajiban Pembeli
- Adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga (barang yang dibeli)

sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang berbunyi: “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Itulah sebabnya pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat berasalan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran, berarti telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”. Waktu dan tempat yang ditetapkan menurut persetujuan, antara lain:¹³

1) Tempat Pembayaran

Pada prinsipnya tempat dan saat pembayaran prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Namun demikian perlu juga ditentukan dalam perjanjian, barulah dipedomani prinsip umum diatas. Yakni pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang. Atas dasae tersebut, maka dapat dilihat:

- a) Pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini di sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli.
- b) Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat di mana barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata. Yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat di mana barang tertentu terletak atau di tempat kediaman penjualnya.

2) Hak Menunda Pembayaran

Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.

Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan pihak ketiga yang masih melekat atau terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli, untuk melindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya. Oleh karena itu, hak menangguhkan pembayaran

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 121-122.

akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan.

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang. Cukup duduk santai di rumah dengan menggunakan handphone atau pun komputer sudah bisa melakukan jual beli diberbagai situs di internet. Keberadaan toko-toko online ini sangat membantu dan memberi kemudahan mendapatkan barang-barang yang ingin dibeli tanpa mengunjungi toko tersebut serta sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin (2004:76) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁶

Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.¹⁷ Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet. X: Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 73.

¹⁶ Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *Jestt 2*, no 1 (2015), h. 50.

¹⁷ Sederet Kamus, Online Indonesia English dictionary. *Sederet.com* <http://mobile.sederet.com/> (di akses, 5 februari 2015).

website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, yang tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli untuk melakukan negoisasi yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti handphone, dan komputer di beberapa situs jual beli yang ada di internet.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum jual beli online diatur dalam :

a. Dalam KUH Perdata

Terjadinya proses jual beli secara lain berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam kitab KUH Perdata dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat sama diartikan dengan perjanjian, hal ini mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak tertulis, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini membedakan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.¹⁸

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

¹⁸ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 7.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:¹⁹ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:²⁰ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

b. Dalam UU ITE

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²¹

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.²²

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:²³

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE :²⁴

¹⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

²⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

²² Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

²³ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17, angka 1.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Dalam penjelasann Pasal 17 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa undang-undang ITE memberikan peluang terhadap pemafaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang badan usaha atau masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi tersebut. Para pihak yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin membelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

4. Syarat Jual Beli Online

Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual dengan ucapan ijab qabul. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli online adalah sama dengan jual beli offline, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual beli online diantara adalah:²⁵

- a. Tidak melanggar hukum agama, seperti misalnya jual beli barang haram, penipuan

²⁵ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Cet 1: Gowa: Alauddin University Press, 2012), h. 32.

dan jual beli yang curang

- b. Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan beli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
- c. Adanya kontrol, sangsi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

5. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat dan beberapa cara jika ingin melakukan jual beli, antara lain:²⁶

a. Melalui Media Sosial

Jual beli menggunakan media sosial saat ini sangat menguntungkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan Twitter. Namun demikian, ada kelemahan mendasar yang membuat kegiatan jual beli lewat cara ini dianggap kurang begitu efektif mendongkrak pemasaran. Jual beli melalui media sosial memiliki kelemahan, yang pertama Kelemahannya kurang dipercaya oleh pembeli yang belum mengenal produk dan belum menjadi pedagang yang dapat dipercaya oleh konsumen. Kelemahan kedua adalah manual dalam pencarian konsumen. Dalam arti, kadang penjual tidak mengetahui siapa pembeli dan bagaimana menghadapi konsumen yang memberikan komentar negatif terhadap produk yang dijualnya.

b. Melalui Personal Website

Banyak pelaku usaha yang pada akhirnya melakukan pemasaran menggunakan website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Sisi positif dari penjualan melalui personal website adalah melihat sisi branding yang sangat positif karena bisa mendongkrak gengsi, pamor dan penjualan bagi pemilik website. Tapi kelemahannya, penjual harus punya orang yang benar-benar bisa meluangkan waktu memonitor dan meningkatkan kualitas website tersebut. Effort (usahanya) sangat besar, susah kalau punya website tapi tidak ada yang maintenance dan tidak interaktif dengan pelanggan.

c. Melalui Online Shop

Menurut Fajrin, ada dua jenis online shop yang berkembang di Indonesia saat ini yakni Situs Iklan Baris dan Marketplace.

²⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), h. 181-182.

1) Situs Iklan Baris

Online shop berbentuk situs iklan baris adalah jenis online shop yang hanya menyediakan platform berbentuk barisan produk yang ditawarkan pengiklan. Contohnya seperti Lazada, Mataharimall.com, Zalora dan sebagainya.

Jenis ini mirip berdagang via medsos, pedagang dan pembelinya bertemu langsung. Pembeli tinggal memilih dari barisan iklan yang terkait dengan barang yang dicari lalu mengontak pengiklan langsung. Cara ini lebih cepat, namun tidak aman baik bagi pembeli maupun penjual.. Bisa saja pembelinya palsu, atau penjualnya yang palsu. Terima uang langsung kabur. Ini tidak amannya. Pemilik situs tentu tidak bisa bertanggungjawab lantaran transaksi dilakukan secara pribadi antara penjual dan pembeli.

2) Marketplace

Marketplace merupakan situs jual beli online yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Situs jual beli berbentuk Marketplace di Indonesia, contohnya adalah LaZada, Bukalapak.com, blibli.com, Tokopedia, Elevania dan lainnya. Situs jual beli jenis ini dianggap lebih aman ketimbang platform jual beli via internet lainnya. “karena sistem pembayaran dilakukan melalui aturan yang diberlakukan pengelola situs sehingga menjamin keamanan transaksi. Baik untuk penjual maupun untuk pembelinya. Pengusaha juga tidak perlu pusing memikirkan transaksi karena semua terekam, tidak akan terlewat”. Jelas Fajrin. Meski demikian, situs jual beli model seperti ini menerapkan tarif bagi setiap transaksi sebagai biaya pengelolaan situs yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan sewa tempat.

6. Mekanisme Dan Proses Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online biasanya telah didahului oleh penawaran jual beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online melalui website, situs di internet atau posting di mailing list atau news group dengan modul busines to busines atau busines to commerce.²⁷

²⁷ Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, h. 50-51.

Sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk: 1) menyediakan harga kompetitif. 2) menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. 3) menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 4) menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. 5) memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. 6) menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. 7) mempermudah kegiatan perdagangan.²⁸

E-commerce memberikan manfaat antara lain: 1) Mendapatkan pelanggan baru. 2) Menarik konsumen untuk tetap bertahan. 3) Meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya e-commerce memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan layanan dengan melakukan interaksi yang lebih personal sehingga dapat memberikan informasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. 4) Melayani konsumen tanpa batas waktu.²⁹

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah dalam hal ini OJK memberikan kewenangan khusus untuk pelaksanaan pengawasan dalam bentuk kepatuhan dan risiko pada perbankan syariah. Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud ialah kepatuhan perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi prinsip dasar pada perbankan syariah dan tingkat risiko kesesuaian hukum syariah terhadap pelaksanaan kegiatan pada perbankan syariah.³⁰

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad (2000:53) pada umumnya jual beli online memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya:³¹

- a. Transaksi melalui chatting atau video conference adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedangkan video conference dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.

²⁸ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah", *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020), h. 80.

²⁹ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah", h. 80.

³⁰ Nur Taufiq Sanusi, Hadi Daeng Mapuna, Andi Nurhani Mufrih, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna* 2 no. 2 (2020): h. 6.

³¹ Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Elektronik Commerce (e-commerce): Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, h. 53.

- b. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah harus memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang diorder tersebut.

Model transaksi melalui website atau situs resmi yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart. Order form adalah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain yang berkaitan proses jual beli yang dilakukan. Sedangkan shopping cart adalah sebuah software di dalam website yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item untuk diletakkan dalam kereta belanja yang kemudian membelinya setelah check out. Secara ringkas dalam online orders ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu find it, explore it, select it, buy it dan ship it.³²

7. Metode Transaksi Jual Beli Online

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai metode transaksi yang aman. Saat ini jenis transaksi jual beli emas online semakin beragam, berikut metode-metode transaksi tersebut:³³

- a. Transfer bank

Transfer antar bank adalah metode yang paling banyak dipilih dalam berinteraksi online. Hal tersebut tentu saja karena caranya lebih mudah dan cepat. Tidak perlu bertemu langsung dengan penjual, anda bisa melakukan transaksi saat itu juga. Terlebih lagi jika anda sudah memiliki layanan internet banking atau mobile, tentu saja kegiatan transaksi akan terasa lebih cepat. Hanya saja metode ini membutuhkan kepercayaan yang besar antara pembeli dan penjual.

³² Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 29.

³³ Saiful Imran, "Macam-Macam Metode Pembayaran Dalam Jual-Beli Online", *ipankint.com*. <https://ipankint.com/internet/bisnis-online/metode-pembayaran-jual-beli-online/> (di akses, 1 Februari 2018).

b. Cash On Delivery atau COD

Metode ini bisa dijadikan sebagai pilihan terbaik, pasalnya metode ini akan mengarahkan pembeli dan penjual bertatap langsung untuk memberikan barang yang diperjualbelikan termasuk dengan uangnya.

c. Credit Card

Metode ini biasanya digunakan untuk transaksi yang bersangkutan dengan perusahaan besar. Harga barangnya pun cukup mahal, sehingga metode ini banyak dipilih pembeli. Meskipun demikian, saat ini mulai banyak pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk membayar dalam nominal yang kecil. Tidak lain karena kemudahan dan kecepatannya dalam transaksi karena pembayaran dapat dikonfirmasi secara instan saat itu juga.

d. Rekening Bersama

Jasa pembayarannya netral dan independen antara pembeli dan penjual. Metode ini sebenarnya sangat simple, dimana pembeli memesan barang pada penjual lalu melakukan pembayaran melalui penyedia rekening bersama. Selanjutnya produk dikirim ke pembeli oleh penjual. Sementara jasa penyedia rekening bersama mengirim uang yang diberikan pembeli kepada penjual. Metode menggunakan rekening bersama dianggap lebih aman untuk melakukan transaksi, karena selama ini memang cukup banyak kasus penipuan dalam melakukan transaksi online.

e. Mata Uang Elektronik atau e-Currency

Metode ini hampir sama dengan internet banking, mata uang elektronik ini disediakan oleh beberapa website penyedia e-Payment atau e-Currency. Transfer nominal dapat dilakukan dengan mudah secara realtime dan instan. Bahkan metode ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran hanya dengan melakukan satu kali klik. Tidak mengherankan jika banyak pula pembeli dan penjual yang memilih salah satu dari macam-macam pembayaran dalam Jual-Beli Online ini. Pembayaran dengan e-Currency yang paling populer adalah dengan menggunakan paypal. Paypal adalah e-currency sejenis mendukung untuk pembayaran secara global, sehingga memberikan kemudahan dalam pembayaran untuk pembayaran ke luar negeri.

f. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, music, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.

8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam jual beli online ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh penjual dan pembeli, antara lain:

a. Kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi penjual/pelaku usaha antara lain :

Ada beberapa kelebihan bagi penjual/pelaku yaitu :³⁴

1) Modal awal yang lebih kecil

Keuntungan pertama dari menjual barang secara online adalah hanya memerlukan modal yang relatif lebih kecil dibanding berjualan offline. Karena kita tidak perlu mendirikan atau menyewa lahan sebagai tempat berjualan. Bahkan kita tidak memerlukan biaya operasional. Kita butuhkan hanyalah akses internet dan mungkin sebuah kamera untuk mengambil foto dari barang-barang yang ingin kita jual.

2) Bisnis beroperasi 24 jam

Keuntungan kedua dari berjualan online adalah kita tidak perlu khawatir lagi kapan waktunya membuka dan menutup toko, karena toko kita bisa diakses selama 24 jam. Bahkan bila kita menerima pesanan di jam tidur (sekitar 23.00 – 06.00) kita masih bisa memproses keesokan harinya. Sehingga bisnis kita berjalan secara optimal.

3) Target pasar yang lebih luas

Bayangkan bila kita berada di wilayah terpencil dan tidak memiliki banyak penduduk, target konsumen kita hanyalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Bisnis kita tentunya tidak akan berkembang. Solusinya adalah dengan berjualan online. Menurut laporan terakhir dari APJII, pada tahun 2014 saja terdapat kurang lebih 71 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa besar potensinya.

4) Bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja

³⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), h. 180-181.

Dengan bantuan internet, sekarang kita tidak harus lagi terpaku di satu tempat untuk mengelola bisnis kita. Kita bisa mengakses dan mengelolanya dari mana saja dan kapan saja selama masih ada akses internet. Sehingga waktu kita lebih fleksibel dan lebih optimal.

Selain kelebihan yang dibahas diatas, jual beli online juga mempunyai kekurangan bagi penjual/pelaku usaha yaitu:³⁵

- 1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, apalagi berkenaan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal.
- 2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
- 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
- 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi.
- 5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.
- 6) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila yang disebarkan adalah reputasi baik.

³⁵ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.

b. Kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi pembeli/konsumen antara lain :

Berikut dibawah ini beberapa kelebihan jual beli online bagi pembeli/konsumen yaitu :³⁶

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- 5) Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Selain kelebihan yang dibahas diatas, jual beli online juga mempunyai kekurangan bagi pembeli/konsumen, antara lain:³⁷

- 1) Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain , tingkat kehalusan dan sebagainya.

- 2) Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan

³⁶ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017), h. 56-57.

³⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", h. 57-58.

adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja.

3) Pengiriman mahal.

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barangbarang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia.

4) Risiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentanakan penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.



BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE

A. *Jual Beli Online Menurut Hukum Islam*

Dalam fiqh muamalah Islam, jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut *salam*, dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.

1. *Pengertian Salam*

As-salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang.¹

Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.²

Jual beli *salam* menurut terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.³

Selain definisi tersebut, beberapa definisi mengenai *salam* yang berkembang dikalangan fuqaha, antara lain:⁴

Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli *salam* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.

Malikiyah mendefinisikan jual beli *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.

Dari definisi diatas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 116.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 143.

³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009), h. 137.

⁴ Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV* (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 359.

dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.⁵

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* memiliki dasar hukum Islam yang pasti maka dari itu kemudian jual beli ini di kategorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan. Dalil dalil yang dijadikan dasar hukum jual beli sama adalah QS al-Baqarah/2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.⁶
Asbabun Nuzul QS al-Baqarah/2:282

⁵ M. Ali. Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 144.

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2012), h.

Mengenai surah al-Baqarah ayat 282 berdasarkan riwayat dari Rabi' bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorangpun yang bersedia. Maka diturunkanlah ayat ini. Ibnu Abbas berkata: Turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi *bai' salam* yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus. Maka dapat kita lihat bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang di dalam al Qur'an.⁷

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat di anjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁸

Kata *taddayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata dain itu (yakni *dal*, *ya'*, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, ketaatan, dan agam. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang-piutang.⁹

Perintah menulis piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktik para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diteta[kan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *idzal*, apabila pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.¹⁰

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir, al-Munir fi al-Qidah wa as-syari'ah wa al-Manhaj* Jilid 3 (Damaskus: Darul Fikri, 1991), h. 645.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 731.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1*, h. 733.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1*, h. 732.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu, pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidak adilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.¹¹

Selanjutnya kepada para penulis diingatkan agar janganlah enggan menulisnya sebagai tanda syukur sebab Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini banyak ulama sebagai anjuran, ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu dan, pada saat sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.¹²

Kesaksian perempuan dalam transaksi utang piutang, dua perempuan setara dengan seorang laki-laki, atau dengan kata lain kesaksian perempuan setengah dari kesaksian perempuan (QS. Al-Baqarah/2: 282).¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat digaris bawahi saksi perempuan sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Khususnya dalam masalah transaksi utang piutang, perempuan dapat menjadi saksi sendirian jika ia menyaksikannya sendiri, kendati jika ada perempuan lain hanya berfungsi sebagai pengingat (pendamping).¹⁴

Kesaksian dua orang perempuan diperlukan dalam transaksi utang piutang, namun salah satunya hanya berfungsi sebagai pengingat jika terjadi kelupaan. Karena itu, memberi kesan bahwa jika tidak terjadi kelupaan salah satunya, maka tentu satu orang saja yang berfungsi menjadi saksi. Disamping itu dalam konteks kekinian tidak sedikit perempuan memiliki kecakapan terjun dalam bidang bisnis, menjadi manajer di perusahaan-perusahaan besar dan tidak sedikit yang menjadi saksi ahli. Karena itu dalam kondisi saat ini kesaksian perempuan boleh disamakan dengan kesaksian laki-laki.¹⁵

Selain ayat Al-Qur'an ada juga hadis yang dijadikan dasar hukum untuk jual beli salam

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1*, h. 733.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1*, h. 733.

¹³ Halimah B, "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir", *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018), h. 349.

¹⁴ Halimah B, "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir", h. 357.

¹⁵ Halimah B, "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir", h. 359.

salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

عن ابن عباس قال : قَدِمَ انبي صلى الله عليه و سلم المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ وَاشْتَمَرِ
الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلَمٍ وَوَزْنِ مَعْلَمٍ، وَفِي
رِوَايَةٍ عَنْهُ: إِلَى أَجْلِ مَعْلَمٍ¹⁶ ِ

Artinya :

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu satu tahun dan dua tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula” (HR. Muslim).¹⁷

Dari hadis diatas penulis menjelaskan bahwa jika ingin melakukan transaksi jual beli atau sedang ingin memesan sesuatu hendaknya memesan dengan takaran, timbangan, dan hingga tempo yang diketahui atau disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman jika pesanan sudah diterima oleh pembeli dan juga transaksi jual beli pesanan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat menurut sumber hukum yang ada.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, terdiri atas:¹⁸

a. Al-Aqid

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam pihak penjual disebut dengan *al-muslam ilaih* (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut *al-muslam* atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan) Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *Ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

b. Objek Jual Beli Salam

Yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli

¹⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyari al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 51-52

¹⁷ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi, *At-Tajrid ash-sharib li Ahadits al-Jaami’ ash-shahib mukhtashar shahih muslim*, terj. Abdurrahman Nuryaman, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 433

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 48.

disebut *al-Muslam Fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai kehendak syari'at" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁹

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.²⁰

Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah *baligh* itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.²¹

b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidak

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 74.

²⁰ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 1006), h. 54.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 31.

jelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

- 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.²²
- c. Syarat terkait dengan barang, diantaranya:
- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas mislanya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.²³ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.²⁴
 - 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayannya untuk menyediakan barang tersebut.
 - 4) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.²⁵
 - 5) Disebutkan tempat penyerahan barang.

²² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79.

²³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.

²⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 51.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 150.

d. Syarat waktu dan tempat penyerahan barang

1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.²⁶ Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskan. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.²⁷

e. Syarat *Ijab* dan *Qabul* (*sighat*)

- 1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- 2) Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majlis akad tempat terjadinya *qabul*.²⁸ Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat

²⁶ Ardiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), h. 93.

²⁷ Ardiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 94.

²⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 51.

juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabul*.²⁹

- 3) Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata-kata jual beli (*al-bay'*) maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan adalah karena jual beli pesanan termasuk jual beli yang secara *qiyas* tidak diperbolehkan, akan tetapi pelarangan ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Sehingga para ulama berpendapat perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara'. Oleh karena itu, syara' membolehkan akad ini hanya menggunakan kata-kata *salam* dan *salaf*. Tetapi ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (*al-bay'*) biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.

4. Batal Dan Berakhirnya Jual Beli Salam

Dari beberapa penjelasan mengenai jual-beli *salam*, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual-beli *salam*, ialah:³⁰

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

Dengan adanya penjelasan tentang jual beli *salam* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara prinsip bentuk transaksi jual beli antara *al-salam* dengan *e-commerce* adalah sama yakni sama-sama berbentuk pesanan yang penyerahan barangnya ditangguhkan, sedangkan

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68.

³⁰ Nurmalia, "Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), h. 54-55.

pembayarannya sama-sama tunai. Kendati pada *al-salam* pembayarannya secara konvensional, yakni langsung berbentuk uang tunai sesuai dengan kondisi peradaban yang ada pada waktu itu, sedangkan “tunai” dalam sistem pembayaran pada *e-commerce* dengan memakai media *email* dan *credit card* (kartu kredit) secara online.³¹

Secara garis besar, antara *e-commerce* dengan *bai' as-salam* memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada beberapa hal yang peneliti dapat rumuskan terkait dengan hal tersebut, baik *bai' as-salam* maupun *e-commerce* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjual-belikan atau obyek transaksi.³²

B. Hukum Jual Beli Online

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan adalah QS an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³³
Asbabun Nuzul QS an-Nisa/4:29

Berkenaan dengan kondisi masyarakat muslim Arab. Masyarakat muslim dalam praktek jual beli mencari harta dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan berbagai macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas, menjelaskan maksud turunnnya ayat tersebut dalam riwayat Ibnu Jarir, seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikan dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya.

³¹ Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020), h. 81.

³² Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady* 2 no. 1 (2020), h. 81.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2012), h. 107.

Berkenaan dengan maksud *taradhin* dalam Q.S an-Nisa/ 4:29 tentang jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya.³⁴

Penggunaan kata *makan* pada ayat diatas untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.³⁵

Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Selanjutnya, ayat diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilakhannya dengan kata *an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah segala sesuatu yang tersembunyi lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³⁶

Prinsip ekonomi yaitu: menciptakan kesejahteraan agama dan sosial. Agama Islam adalah agama yang damai, untuk itu dalam aspek ekonomi, jika ada orang yang berniaga dan ia beraniaya, maka Allah melarang hal aniaya tersebut. Semua ini membuktikan bahwa Islam sangat mengedepankan aspek kesejahteraan dalam agama dan juga sosial.³⁷

Mengabaikan petunjuk diatas oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini, semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern.³⁸

Selain ayat Al-Qur'an ada juga hadis yang dijadikan dasar hukum untuk jual beli.

³⁴ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 787.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*, h. 499.

³⁷ Sohrab, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Al-Qadau* 1, no. 2 (2014): h. 79.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*, h. 499-500.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحَارِثٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. قَالَ : ابْيَعَانِ
بِاخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا . وَإِنْ كَرَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ
بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا .³⁹

Artinya :

Dari Abdullah bin Al-Haris, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Muhammad sallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (HR. Muslim).⁴⁰

Dari hadis di atas penulis menjelaskan setiap penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih dalam transaksi jual beli sebelum berpisah agar transaksinya bisa sesuai dengan syara-syarat yang ada. Jika penjual dan pembeli jujur dan terus terang terhadap transaksi jual beli tersebut maka jual beli itu memperoleh keberkahan di dalam transaksi tersebut, dan jika keduanya selalu berdusta dan saling menutupi maka pasti hilang keberkahan bagi mereka dalam transaksi jual beli tersebut.

Berikut beberapa pendapat ulama tentang jual beli menurut kitabnya masing-masing, ada tiga antara lain :

1. *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*

Dalam permasalahan jual beli di masjid, Syaikh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh al- Mazahib al-Arba'ah* menyimpulkan bahwa hukum transaksi di masjid menurut para mazhab sebagai berikut :⁴¹

a. Pendapat Mazhab Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan dianjurkan. Dan, tidak dimakruhkan pula bagi orang-orang yang *beri'tikaf* untuk melakukan urusan apa pun di dalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-

³⁹ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 11.

⁴⁰ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Rohmad Arbi, Nur shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajriyah, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 446.

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, terj. Qalbi Djabir, dkk, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 287.

anaknya selama ia tidak menghadirkan barang-barangnya ke dalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti lainnya, yaitu dimakruhkan.

b. Pendapat Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli didalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjual belikan di sana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya diharamkan. Dan, berbeda pula hukumnya untuk akad *hibah* (pemberian secara cuma-cuma) atau akad nikah, yang mana keduanya boleh dilakukan di dalam masjid, bahkan untuk akad nikah sangat dianjurkan untuk diselenggarakan di dalam masjid, namun hanya *ijab qabulnya* saja, tidak untuk syarat-syarat yang tidak masuk dalam syarat sahnya pernikahan, ataupun percakapan di luar akad pernikahan dan lain sebagainya.

c. Pendapat Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab hanbali: diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan.

d. Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab syafi'i: diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang *beri'tikaf*.

2. *Al- Fiqh Sunnah*

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* secara bahasa kata bai berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang di tunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan

pertukaran dalam bentuk yang di izinkan.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya hikmah jual beli, Allah swt mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab setiap orang dar suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama ia hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambil dari orang lain yang dibutuhkannya.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya, apabila akad jual beli sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. Di antara keduanya boleh melakukan tindakan terhadap kepemilikannya setelah berpindah selama masih sesuai dengan syariat.⁴⁴

3. *Al- Fiqh Islam Wa Adillatuhu*

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay* yang artinya jual beli termaksud kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal kata *syira'*. Menurut ulama Hanafiyah dalam Wahbah Az-Zuhaili adalah tukar menukar barang atau harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni *ijab qabul* atau tanpa *ijab qabul*. Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah karena jual beli barang yang tidak disenangi.⁴⁵

Kata *bay'* adalah pecahan dari baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.⁴⁶

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Insan Kamil, 2013), h. 158.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, h.159.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, h.160.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 25.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 26

jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelauakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli barang yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah.⁴⁷

Semua ulama menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan komitmen bersama. Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah pernyataan transaksi, sedangkan menurut para ulama ahli hukun disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan transaksi disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dianggap boleh oleh syariat.⁴⁸

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat *ditakhrij* dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 27

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 29

barang, antara lain :⁴⁹

1. Pemilik Situs Merupakan Wakil (Agen) Dari Pemilik Barang

Apabila pemilik situs / website adalah orang yang bukan pemilik barang namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya dengan mendapatkan komisi persentase yang sudah disepakati bersama, maka hal inipun diperbolehkan karena hakikatnya wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.

2. Pemilik Situs Bukan Pemilik Barang

Pada kasus ini seorang pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah meyakini keberadaan barang, lalu si penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Apabila pemilik situs menampilkan barang tapi bukan pemilik barang tersebut, maka para Ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual belinya karena mengandung unsur gharar disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata,

Solusi Syar’i Supaya jual beli online seperti ini ingin menjadi sah, maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut.⁵⁰

1. Beritahu bahwa setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs).
2. Setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh langsung akad jual beli melainkan harus membeli dulu barang dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima barangnya. Kemudian baru ia menjawab permohonan pembeli dan memintanya mentransfer uang ke rekening miliknya lalu barang dikirim kepada pembeli dengan jaminan barang sesuai dengan di gambar dan spesifikasinya. Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via jual beli online menarik kembali keinginan atau membatalkan jual belinya, maka si pemilik situs membuat perjanjian selama waktu tunggu (3 hari) ia berhak mengembalikan barang

⁴⁹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah* 6 no. 2 (2017), h. 379-380.

⁵⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, h. 380.

kepada pemilik barang yang sesungguhnya.

C. Syarat Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:⁵¹

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhha'*) atau pembatalan (*Fasakh*).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.

Di samping itu adalah haram. Sebagian perbuatan yang ter hukum haram ada yang semata-mata praktek keagamaan saja, seperti larangan makan babi dan jual beli pada waktu shalat jum'at. Pelanggaran terhadap hal ini tidak mendapat sanksi hukum di dunia tapi di akhirat (neraka), meskipun banyak juga perbuatan haram yang bisa dijatuhi hukuman oleh peradilan.⁵²

Di samping itu ada juga perbuatan yang berada di antara wajib dan haram yaitu sunnah dan makruh. Pelanggaran terhadap keduanya hanya memperoleh keridhaan dan kebencian Tuhan. Dalam hal inilah dikotomi antara hukum dan moral cukup jelas.⁵³

D. Langkah-Langkah Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:⁵⁴

1. Produk Halal.

⁵¹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", h. 59-60.

⁵² Nur Taufik, "Syariah: Antara Hukum Dan Moral", *Ar-Risalah* 20, no. 1 (2020), h. 90.

⁵³ Nur Taufik, "Syariah: Antara Hukum Dan Moral", h. 90-91

⁵⁴ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", h. 384.

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram. Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

2. Kejelasan Status.

Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

3. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang.

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4. Kejujuran Anda.

Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsny atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan.

E. Keharaman Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab:⁵⁵

1. Sistemnya haram, seperti game gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online).
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Dalam transaksi jual beli online menurut hukum Islam penulis menyimpulkan sebelum melakukan transaksi tersebut ada beberapa yang harus diperhatikan agar tidak terjadi yang tidak di inginkan karena maraknya penipuan dan bisa membuat pembeli merasa dirugikan. Terdapat syarat-syarat yang mengharuskan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tersebut seperti tidak melanggar ketentuan syariat agama, adanya perjanjian kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi tersebut, dan juga adanya aturan tegas dan jelas dari pemerintah untuk menghuindari kecurangan yang dilakukan pihak penjual kepada pembeli supaya transaksi tersebut membawa keberkahan .

Agar terhindar keharaman dari transaksi jual beli online sebaiknya mengetahui kualitas dari toko, dan barang milik penjual apakah kejelasan dari produk tersebut tidak mengandung keharaman didalamnya. Berniaga secara online itu harus menjunjung tinggi kejujuran terutama

⁵⁵ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, h. 60.

di pihak penjual jangan sampai melakukan penipuan didalam transaksi tersebut, bahkan sering terjadi pihak dari pembeli sudah mengirimkan uang namun pihak penjual langsung hilang kabar dan memblock kontak dari pembeli. Untuk itu sebagai pihak dari pembeli sebelum melakukan transaksi tersebut seharusnya mencari semua kejelasan dari toko serta produk yang dijual agar tidak terjadi yang tidak di inginkan, karena sama juga melanggar syarat jual beli.



BAB IV

ANALISIS SYARAT KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN PASAL 1320 KUH PERDATA

A. *Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam*

Bagi hukum Islam, kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah oleh seseorang untuk mengeksploitasi yang lainnya, dan harus aman digunakan karena prinsip syariahnya terpenuhi. Untuk menilai apakah aktivitas jual beli online sudah sesuai dengan syariah, konsep usaha yang Islami dapat digunakan sebagai acuan, yaitu konsep halal. Halal dalam hal ini adalah mengambil yang baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha), halal dalam prosesnya (berlaku adil dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaannya (saling tolong menolong dan menghindari risiko yang berlebihan).¹

Permasalahan pertama adalah kehalalan suatu produk yang ditransaksikan dalam jual beli online. Jika barang yang ditawarkan jelas haram menurut Islam kita bisa menghindar dari membelinya. Yang lebih perlu dicermati adalah penawaran dari mancanegara, karena penjual yang umumnya nonmuslim tidak memahami pembatasan halal haramnya suatu produk. Jadi, disini kewajiban pembeli yang muslim untuk menilai kehalalan produk yang ditawarkan. Selain termasuk kategori halal, harus diusahakan agar sedapat mungkin produk tersebut juga *thayyib*. Bagi penjual yang muslim ketentuan mengenai halal dan *thayyib* produk yang dijual merupakan suatu keharusan. Sebagai contoh, senjata bisa saja dikategorikan produk yang *thayyib*, jika diperuntukkan untuk kebutuhan berjaga-jaga, tetapi, jika digunakan untuk kejahatan barang tersebut jelas haram menurut hukum Islam. Hal seperti ini perlu diperhitungkan ketika akan menawarkan produk tersebut.²

Masalah yang lain bisa timbul pada transaksi melalui jual beli online adalah barang yang tidak diserahkan tidak pada saat transaksi, hal ini berbeda dengan transaksi yang tradisional sifatnya, dimana segera setelah transaksi barang langsung dibawa oleh pembeli. Hukum Islam mengenal transaksi dengan sistem pembayarannya disegerakan, tetapi penyerahan barang ditangguhkan (transaksi *as-salam*). Mengacu pada bentuk-bentuk transaksi yang sudah dikenal dalam Islam ini, tentunya penyerahan barang ditangguhkan seperti dalam transaksi jual beli online tidak masalah, karena ini dalam rangka memudahkan umatnya ketika bermuamalah. Jadi,

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 203.

² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 204.

yang terpenting dalam Islam sendiri tidak melarang bahwa penyerahan barang tersebut bisa dilakukan saat selesai yang terpenting adalah sifat benda tersebut harus dinyatakan secara konkret.³

Polemik jual beli online menyisahkan resiko yang dapat merugikan keduanya ataupun menguntungkan keduanya. Oleh karena itu, Islam memang memperbolehkan jual beli online selama tidak ada dalil yang melarangnya, namun ada beberapa ketentuan yang berlaku agar jual beli online sah untuk dilakukan dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu :⁴

- 1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli.**
 - a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat, dan dapat membedakan (memilih).
 - b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- 2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli.**

Syarat-syarat yang harus ada pada barang yang dijadikan objek jual beli sebagai berikut

- a. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis.
- b. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah.
- c. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- d. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya saja dalam janji, maka hukumnya boleh.

Syarat-Syarat “barang yang diserahkan” memerlukan unsur penyempurna berupa penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian (*gharar*), dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Sedangkan syarat-syarat pada “objek harus tertentu” memerlukan unsur penyempurna yang tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung *gharar* maka akadnya *fasid*. Kemudian “objek harus ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna berupa harus bebas dari syarat *fasid* dan bagi akad atas

³ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 87.

⁴ Muhammad Yunus, Nadhirah Naimi, *Fiqh Muamalah* (Medan: CV Ratu Jaya, 2011), h. 104.

beban harus bebas dari riba.⁵

Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan suatu akad menjadi fasid (cacat hukum menurut hukum positif) ada 4 macam yaitu :⁶

- 1) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 2) Gharar
- 3) Syara-syarat fasid (akad yang menurut syarak sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya)
- 4) Riba, oleh karena itu suatu akad harus bebas dari keempat faktor ini untuk terbentuknya suatu akad yang sah

Konsep jual beli online dilakukan hanya melalui media, oleh karena itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan hendaknya disesuaikan dengan kualifikasi keadaan barang nyata. Agar nantinya pembeli tidak kecewa dengan barang yang telah dibeli. Jadi, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan jual beli tersebut dikatakan tidak sah dan telah melanggar sesuai dengan syariat Islam.⁷

3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli.

Ijab kabul selain diucapkan juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya :⁸

- a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab kabul dengan cara tulisan.
- b. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

Syarat ini menurut sebagian ahli hukum Islam menyatakan tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun, jumhur ahli hukum Islam mengatakan bahwa syarat dari akad yaitu

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 100

⁶ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dalam Dari Perjanjian)* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 196.

⁷ Deery Anzar Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020), h. 184.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 49.

kabul memerlukan penyempurna yaitu kabul harus dinyatakan secara ikhlas, bebas, dan tanpa paksaan atau tekanan. Jika pernyataan kehendak (kabul) dilakukan dalam keadaan tidak bebas, paksaan, dan tekanan, maka akadnya menjadi *fasid*. Namun, menurut zulfar yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa bebas dari paksaan dan tekanan tidak termasuk syarat sahnya akad, hanya akbiat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, *makruf*) sehingga membutuhkan perjanjian dari pihak yang telah dipaksa atau ditekan.⁹

Dibandingkan dengan Hukum Perdata yang menggunakan istilah “sepakat” sebagai perwujudan pernyataan kehendak, maka apabila pihak-pihak atau salah satu pihak menyatakan kehendaknya karena adanya paksaan dan tekanan, maka perjanjian tidak otomatis batal, melainkan telah dianggap sah akan tetapi dapat dibatalkan apabila pihak yang dipaksa atau pihak yang berkepentingan terhadap perjanjian yang telah lahir itu mengajukan gugatan untuk pembatalan perjanjian yang dimaksud.¹⁰

Dari beberapa syarat jual beli tersebut, hal yang menjadi pengaruh besar sah nya transaksi adalah akad. Dimana akad merupakan perjanjian kedua belah pihak yang menegaskan antara *ijab* dan *qabul* dalam sebuah transaksi jual beli. Mengingat sering terjadi malapraktik jual beli online, rukun ini juga harus dipenuhi agar transaksi bisa dikatakan sah. Antara penjual dan pembeli harus sama-sama memberikan kesepakatan dan informasi yang sebenar-benarnya.

Islam memang mengikat semua aspek kehidupan manusia tidak terkecuali kegiatan bermuamalah atau jual beli. Sesuai dengan ketentuan Islam terkait jual beli, maka rukun dan syarat menjadi acuan penting bagi para penjual dan pembeli. Sudah saatnya para penjual atau pembisnis memahami tentang konsep bermuamalah sesuai dengan syariat, agar bisnis yang dijalankan tidak terjerumus kedalam hal yang haram. Serta sudah saatnya pembeli menjadi konsumen cerdas dalam melakukan transaksi jual beli online.

Tersedianya berbagai jenis media massa baik facebook, instagram, line, telegram, dan lain sebagainya, masyarakat bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli. Kembali lagi kepada pembeli tentang keinginan untuk membeli sebuah barang di toko online. Bagaimana individu itu sendiri menyikapi kehendak untuk belanja secara online. Baik dari segi penjual, juga harus bersikap selayaknya ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Menjalankan bisnis secara online, saat ini memang menjadi pilihan alternatif untuk

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah)*, h. 99

¹⁰ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dalam Dari Perjanjian)*, h. 196.

meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan omset dari penjualan, apalagi di masa pandemi sekarang yang membuat semua orang menjalankan aktivitasnya di dalam rumah dan pemerintah pun juga membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah. Namun perlu diingat bahwa konsep kemashlahatan dan prinsip kejujuran dari kedua belah pihak harus tetap ditegakkan. Agar nantinya alur transaksi jual beli bisa dikatakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada kerugian yang dirasakan salah satu pihak.

B. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.¹¹

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, isi suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:¹²

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Untuk kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang atau subjek hukum yang melakukan perjanjian sedangkan syarat dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Syarat pertama dan syarat kedua yaitu mengenai syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak merupakan syarat subyektif yaitu syarat yang menyangkut subyek dari perjanjian, kalau syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa tidak memberikan pernyataannya secara bebas atau pihak yang merasa tidak cakap. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut obyek dari perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.¹³

Kesepakatan para pihak dalam hal ini merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran itu. Adapun teori-teori tentang kesepakatan

¹¹ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 91.

¹² Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, h. 93.

¹³ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, h. 94.

yaitu :

1. Teori Pengiriman, bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak yang menyampaikan penawaran.
2. Teori Penerimaan, bahwa menurut teori ini kesepakatan terjadi ketika jawaban atas penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.
3. Teori pengetahuan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran itu oleh pihak lain selaku calon pembeli.
4. Teori Dugaan, menurut teori ini bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran (pembeli) sudah menduga bahwa suratnya yang berisi penerimaan penawaran itu sudah diterima pihak yang menawarkan.

Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli biasa para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berap harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan pada jual beli secara online, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang, berikut beberapa syarat mengenai perjanjian jual beli online :

1. Syarat Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya.¹⁴ Dengan menelaah keempat syarat sah perjanjian tersebut dalam konteks dengan perjanjian jual beli online dapat kita lihat bahwa :

¹⁴ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 56.

a. Kesepakatan mereka yang melakukan perjanjian jual beli online

Sepakat diartikan sebagai penjual menawarkan kepada pembeli, karena penjual menghendaki sejumlah uang, dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Sebaliknya, pihak pembeli menghendaki barang sehingga menyetujui membeli barang milik penjual, dan pihak penjual menyetujui untuk menjual barangnya kepada pihak pembeli.¹⁵

Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, Kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.¹⁶

Sehubungan dengan hal itu dalam pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan¹⁷. Dengan demikian cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata tersebut meliputi:

1) Kesesatan atau kekhilafan (dwaling);

Maksud dari pasal ini tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak khilaf bukan mengenai hal yang pokok dalam perjanjian. Demikian pula, kekhilafan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika seseorang hanya khilaf tentang subjek perjanjian, kecuali kalau yang menjadi objek perjanjian adalah keahlian orang tersebut.¹⁸

2) Paksaan (dwang atau bedreiging);

Pasal ini hanya menerangkan bahwa orang yang terpaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan psikologis diberikan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, baik itu paksaan yang datang dari pihak lawannya maupun paksaan yang datang dari pihak ketiga.¹⁹

¹⁵ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dalam Dari Perjanjian)*, h. 187.

¹⁶ Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020), h. 169.

¹⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321

¹⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 69-70.

¹⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, h. 70.

3) Penipuan (bedrog)

Orang yang menyetujui membuat perjanjian karena ditipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia tidak ditipu. Hal ini dapat dilakukan jika memang penipuan tersebut terbukti secara hukum.²⁰

Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUH Perdata tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, di dalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden* atau *undue influence*).²¹

Dalam jual beli online, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang melalui website maupun situs online lainnya. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim chat atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap customer.

Dengan melihat dari proses berlangsungnya transaksi dalam hubungan jual beli online ini maka kalau ditinjau kepada syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata maka dapat kita lihat yang pertama adalah syarat adanya kesepakatan antara para pihak, apabila ditinjau dari unsur kesepakatan maka hubungan jual beli online ini telah memenuhi unsur kesepakatan. Dalam hal ini dapat kita analisa dengan menggunakan pendekatan teori penerimaan dimana menurut teori ini bahwa kesepakatan dikatakan telah tercapai dengan diterimanya oleh penjual jawaban dari pembeli atas penawaran yang disampaikannya. Dalam hubungan jual beli online, hal ini dapat dilihat dari adanya formulir pemesanan melalui chat yang telah di isi oleh pembeli yang kemudian dikirim kepada penjual. Selanjutnya akan disepakati hal lainnya mengenai proses atau

²⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, h. 73.

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), h. 218.

cara pembayaran dan cara pengiriman barang yang dipesan tersebut.²²

b. Kecakapan bagi para pihak yang melangsungkan perjanjian jual beli online

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum.²³

Dalam hubungan jual beli online yang mana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak bertemu secara fisik (*face to face*), maka memang agak kesulitan melihat secara langsung kondisi kecakapan bagi penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pembeli yang melakukan pembelian suatu produk yang ditawarkan oleh penjual ternyata ia belum cakap, misalnya usia yang belum tergolong dewasa, atau juga ternyata ia seorang yang berada dibawah atau perwalian.²⁴

Menurut hukum perdata bahwa subjek hukum yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah memenuhi kriteria kecakapan yakni telah dewasa, berakal sehat, tidak dibawah pengampuan. Oleh karena nya ketentuan mengenai syarat cakap yang dikehendaki dalam pasal 1320 KUH Perdata ini dalam perjanjian jual beli online agak kurang terpenuhi. Walaupun dalam hal ini jika melihat cara penjual dapat mengetahui kecakapan pihak pembeli dengan melihat kepada alat pembayaran yang digunakan seperti kartu kredit atau secara cash yang biasa disebut *cash on delivery* (COD) harus dengan menggunakan namanya si pembeli itu sendiri, dengan demikian ketentuan kedewasaan dapat dipenuhi.

Walaupun untuk alat pembayaran yang lain sulit mengetahui keberadaan si pembeli ini apakah cakap atau tidak, jika ia menggunakan cara pembayaran dengan sistem transfer uang melalui rekening yang disediakan oleh penjual. Dan memang banyak terjadi dalam hubungan jual beli online ternyata syarat sah yang kedua yaitu kecakapan tidak terpenuhi dengan baik, karena sekarang ini internet sudah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat bahkan oleh anak-anak remaja yang belum tentu tergolong dewasa. Dan jika pihak yang bersangkutan merasa tidak dirugikan dan tidak

²² Rahmida Erliyani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata”, *Laporan Penelitian (Mandiri)* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 24.

²³ Zaeni Asyhad, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam, Dan Hukum Adat)*, h. 73.

²⁴ Rahmida Erliyani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata”, *Laporan Penelitian (Mandiri)* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 24-25.

mempersoalkan hal tersebut artinya tidak mengajukan pembatalan, maka perjanjian ini sah-sah saja.

Dalam pelaksanaan jual beli online orang yang belum cakap melakukan perjanjian dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak karena jika dikaitkan dengan unsur kecakapan dalam KUHPerdato dan pelaksanaan jual beli online sulit untuk diketahui apakah seseorang tersebut cakap hukum atau tidak.²⁵

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi jual beli barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara online, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran barang oleh penjual. Baik jual beli secara langsung atau secara online harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

Dalam transaksi jual beli online dimana penjual menawarkan barang-barang yang diperdagangkan di situs online selalu menyampaikan atau memaparkan jenis barang serta keterangan lainnya mengenai barang tersebut baik kualitas maupun jenis dan ukurannya. Tentunya dalam keadaan yang demikian berarti syarat obyektif untuk sahnya perjanjian termasuk perjanjian jual beli menurut KUH Perdata dalam hal ini telah terpenuhi dalam perjanjian jual beli online.²⁶

Dalam pelaksanaan jual beli online sering terjadi wanprestasi karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung namun bertransaksi melalui media internet dan pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dipajang penjual melalui media elektronik sehingga konsumen dirugikan. Hal ini merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan konsumen.²⁷

²⁵ Nafa Amelsi Triantika, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata", *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (Juni), h. 122.

²⁶ Rahmida Erliyani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata", *Laporan Penelitian (Mandiri)* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 26.

²⁷ Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)", *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 4, (2015), h. 5.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Perjanjian secara online harus menganut prinsip iktikad baik.

Dalam jual beli online penjual melakukan perjanjian kepada pembeli dengan menawarkan barang ke situs internet yang pastinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum agar perjanjian jual beli ini bisa lancar dan tidak menimbulkan kekacauan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Barang yang di jual itu harus jelas serta harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi penjualan.

2. Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Dikaitkan Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Belum Dewasa

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Bagaimanakah kaitan antara syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu kecakapan dikaitkan dengan keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa, dalam artian belum dewasa menurut undang-undang.²⁸ Dalam hal perjanjian jual beli online, para pihak yang mengadakannya tidak bertemu sehingga tidak diketahui apakah mereka memiliki kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian. Ketidakecakapan yang dimaksud di sini adalah dalam konteks bahwa yang mengadakan perjanjian ialah belum dewasa. Dalam hal ini perjanjian itu: dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya.²⁹

Praktiknya, jual beli online tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli online. Tidak hanya praktik jual beli dengan tatap muka yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli online pun terdapat

²⁸ Shinta Vinayanti Bumi, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce", *Hukum Bisnis* 1, no. 3 (2013), h. 4.

²⁹ Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian* (Depok: Universitas Gunadarma, 2005), h. 1.

perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam “*Term and Condition*”. *Term and condition* ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli online dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu. Permasalahannya, sering kali ditemui bahwa pembeli ataupun penjual adalah anak di bawah umur.³⁰

Masih ada pelaku jual beli online di Indonesia yang masih berstatus di bawah umur. Sampai saat ini, pelaksanaan jual beli online di Indonesia belum ada larangan untuk anak di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur batasan usia dalam melakukan jual beli online. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi jual beli online pun masih dapat dikatakan sah. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan jual beli online dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata secara utuh.³¹

Ketika melakukan transaksi jual beli online tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi belanja online oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik e-commerce ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.³²

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

³⁰ Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019), h. 211.

³¹ Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, h. 212.

³² Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 2 (2018), h. 9.

3. Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Dalam KUH Perdata kegiatan pengikatan diri dengan seseorang atau lebih dalam menjalin sebuah hubungan bisnis merupakan arti dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling berpatokan pada persetujuan yang dirancang sejak awal dibentuknya.

Kegiatan transaksi perdagangan melalui media sosial zaman sekarang ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat internasional umumnya dan khususnya pada masyarakat Indonesia. Kecanduan akan proses yang cepat, mudah serta gampang mengakibatkan transaksi komersial berjalan sangat cepat.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh si penjual disini diharapkan mampu melaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Agar terhindar dari berbagai sengketa yang ada bisa sampai menyeret ke dalam penjara. Tanggung jawab disini maksudkan agar si penjual melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai persetujuan yang dilakukan sejak awal transaksi.³³

Banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perdagangan melalui media elektronik ini diharapkan pemerintah lebih tegas dalam melakukan perlindungan agar para pencari uang kotor tidak merajarela dipasaran. Pelaku usahapun dimohonkan guna melaksanakan kegiatan dengan berpatokan pada dasar kejujuran untuk melakukan suatu transaksi.

Adapun bentuk yang diberikan sebagai pertanggung jawaban oleh pengingat usaha atau yang menawarkan barang seandainya terjadi kesalahan ataupun barang yang dikirim cacat ataupun rusak dapat dilakukan dengan :³⁴

1. Pengembalian uang atau penggantian barang yang baru itupun tergantung dari keputusan konsumen yang bersangkutan.
2. Menanggung semua perbuatan yang diakibatkan merupakan definisi dari sebuah arti kata tanggung jawab.
3. Terjadinya unsur kesalahan atau kesengajaan melakukan sesuatu yang merugikan dan membahayakan seseorang ataupun atas kehilangan barang atau sebagainya.
4. Terjadinya kesalahan dalam pemakaian oleh pengguna menyebabkan kerugian yang

³³ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 78.

³⁴ I Komang Mahesa Putra, dkk, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 76.

dialami harus memperoleh tanggung jawab atas kegagalan suatu produk yang dihasilkan.

Kerugian yang ditimbulkan pihak lain atas kesalahan yang dilakukan haruslah sewajarnya mendapat pertanggungjawaban yang sesuai dengan derita yang dia tanggung atas kerugian tersebut. Banyak jenis ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha mulai dari ganti rugi mengembalikan uang konsumen yang dirugikan sampai dengan ganti rugi dengan cara menanggung biaya yang dikeluarkan selama konsumen melakukan pengobatan jika terdapat kerusakan fatal yang terjadi pada fisik konsumen tersebut.

4. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Seperti biasanya kita mengenal jenis transaksi nyata dengan tatap muka langsung, dalam era cepat seperti ini hal itu dapat tidak dilakukan atau dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih menghemat waktu dan tenaga. Seperti yang diketahui transaksi yang dilakukan menggunakan media online sebagai perantara merupakan hal yang sudah lumrah dilakukan saat ini. Perkembangan dunia elektronik yang semakin maju merupakan suatu alasan yang sangat besar melatarbelakangi perubahan komunikasi saat ini. Serasa tidak ada jarak yang memisahkan bahkan satu negara dengan negara lain terasa dekat dikarenakan perkembangan komunikasi dalam bidang elektronik saat ini.³⁵

Namun terdapat banyak masalah yang terjadi karena tidak semua orang mempunyai itikad baik dalam melakukan atau menggunakan media sosial yang ada. Banyak kasus penipuan yang terjadi terutama dalam bidang transaksi perdagangan yang melibatkan si penjual dengan pembelinya. Maraknya kasus penipuan yang terjadi di media internet saat ini lumayan meresahkan pengguna yang memang ingin berbuat baik. Berikut perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan jual beli:³⁶

- a. Diterbitkannya UU mengenai perlindungan konsumen diharapkan bisa memberi solusi terhadap kejadian yang ada saat ini. UU tersebut dijadikan pelindung bagi konsumen yang dirugikan namun dalam hal ini diharapkan UU dapat menjadi keadilan bagi kedua belah pihak. Disini konsumen lebih dititik beratkan karena dalam posisi ini konsumen mempunyai kekuatan yang sangat lemah dibandingkan produsen atau pelaku usaha yang ada.

³⁵ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 85.

³⁶ I Komang Mahesa Putra, dkk, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 75-76.

- b. Secara umum memberikan rasa aman, tentram dan sejahtera dan pengayoman baik hak dari setiap warga dan merupakan kewajiban yang dilaksanakan pemerintah yang berwenang demi menjaga negara agar tetap aman. Dalam hal ini UU dimaksudkan bukan untuk mematikan posisi pelaku usaha atau penggiat usaha, namun ini diharapkan agar menjadi sebuah transaksi yang sehat dan tidak bersifat monopoli atau menipu dikarenakan adanya beberapa oknum yang hanya ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli dengan apa yang dirasakan oleh konsumennya.
- c. Konsumen harus pintar-pintar memilih dan jeli dalam proses pembelian secara tidak langsung ini. Harus dipikirkan secara perlahan jangan hanya karena tergoda dengan potongan harga lalu langsung asal pesan saja tanpa memikirkan resiko yang terjadi, biasanya bila berbelanja secara tidak langsung atau memesan dalam media sosial konsumen diharuskan membayar terlebih dahulu apabila konsumen sudah mentransfer uang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli tersebut maka produsen atau si penjual akan mengirimkan barang sesuai tempat alamat di pemesan tersebut. Suatu cara menghindarkan diri dari penipuan.

C. Perbandingan Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk membandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dan momentum terjadinya akad menurut hukum Islam dan menurut KUH Perdata, maka berikut ini di kemukakan perbedaan dan persamaan antara keduanya, yaitu :³⁷

1. Persamaan

Seperti pada uraian perbedaan syarat akad menurut hukum Islam dengan syarat perjanjian menurut KUH Perdata juga akan dilihat beberapa segi sebagaimana berikut :

- a. Dari segi para pihak yang membuat akad

Syarat kecakapan hukum dalam KUH Perdata sama dengan *Tamyiz* dalam hukum Islam. Artinya, orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam disebut *Mukallaf*, yang meliputi 'aqil, baligh, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum.

³⁷ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)* (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 197-200.

b. Dari segi pernyataan kehendak

Sighat (formulasi) *ijab-qabul* dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan), tulisan, maupun isyarat). Hal ini juga diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

c. Dari segi objek akad

Supaya akad dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat haruslah didukung dengan konsiderasi (prestasi) atau yang biasa disebut objek akad atau perjanjian. Objek akad adalah sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas. Hal ini yang terdapat dalam semua sistem hukum termasuk KUH Perdata dan hukum Islam.

d. Dari segi tujuan akad

Syarat causa yang halal senada dengan tujuan pokok akad dalam hukum Islam yang dimaksud halal yakni tidak boleh bertentangan dengan *syara'*.

2. Perbedaan

Untuk mengetahui perbedaan antara rukun atau unsur dan syarat-syarat terbentuknya perjanjian menurut KUH Perdata dan Akad menurut hukum Islam dapat dilihat dari segi-segi berikut ini :

a. Dari segi para pihak yang membuat akad

Apabila dilihat dari segi para pihak yang membuat akad atau perjanjian, maka perbedaannya adalah :

- 1) Para pihak yang membuat akad yang dalam KUH Perdata merupakan syarat sah perjanjian namun dalam Hukum Islam hal ini merupakan rukun dalam akad, dan masih memerlukan syarat penyempurna yaitu *Tamyiz* yang dalam KUH Perdata disebut dengan kecakapan hukum para pihak.
- 2) Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Dalam hukum Islam batasan umur berlaku untuk keabsahan akad diserahkan kepada 'urf atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan hukum)

seseorang menurut KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Dibeberapa negara bagian di Amerika Serikat ada yang menentukan batasan umur bagi wanita adalah 18 tahun.

b. Dari segi kehendak

Dalam hukum Islam disebut dengan *ijab-qabul*. Secara umum dalam hal pernyataan kehendak antara KUH Perdata dan hukum Islam memiliki kriteria yang sama, namun dalam hukum Islam hal ini masih memerlukan syarat penyempurnaan yang tidak disebutkan dalam KUH Perdata yaitu :

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras, dan
- 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus *muttasbil* (nyambung, *connect*), yakni dilakukan dalam satu majlis' aqad (tempat kontrak).

c. Dari objek akad

Objek akad disebut juga sebagai prestasi dalam KUH Perdata yaitu “Apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitu”. Prestasi ini meliputi perbuatan positif dan negatif, seperti :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Hal ini memiliki substansi yang sama dengan objek akad dalam hukum Islam, namun lebih lanjut hukum Islam mensyaratkan bahwa objek akad harus dapat ditransaksikan menurut *syara'*.

d. Dari segi tujuan akad

Tujuan akad dikenal dengan *causa* yang halal dalam KUH Perdata. Namun penjelasan halal di sini bermakna secara umum, yakni tujuan akad yang menjadi tujuan para pihak pembuat perjanjian, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam hukum Islam *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad) merupakan salah satu bagian terpenting yang mesti ada pada setiap akad. Menurut hukum Islam yang menentukan tujuan hukum *aqad* adalah *al-Musyarri'* (yang menetapkan syariat yaitu Allah). Dengan kata lain, akibat hukum suatu akad hanya diketahui melalui *syara'* dan

harus sejalan dengan kehendak *syara'* artinya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits.

Perjanjian	Persamaan		Perbedaan	
	Hukum Islam	Pasal 1320 Kuh Perdata	Hukum Islam	Pasal 1320 Kuh Perdata
1. Para pihak yang membuat akad	Tamyiz	Kecakapan Hukum	Berdasarkan Urf'	Batasan kecakapan hukum 21 tahun
2. Pernyataan kehendak	Ijab-Qabul	Kesepakatan	Terdapat syarat penyempurna ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud dari kedua belah pihak	Memiliki kriteria yang sama yaitu kesepakatan kedua belah pihak
3. Objek	Objek Akad	Objek Perjanjian	Terdapat syarat pokok yakni objek akad harus ditransaksikan menurut syara'	Disebut sebagai prestasi yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur
4. Tujuan akad	Maudhu' Al-'Aqid	Kausa Yang Halal	Akibat hukum suatu akad hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara' artinya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.	Kausa yang halal bertentangan dengan UU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam, jual beli online ada kesamaan dengan jual beli salam atau bisa disebut dengan jual beli barang pesanan. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Dalam hukum Islam juga diperbolehkan jual beli online dengan mengikuti seluruh rukun dan syarat sebelum melakukan transaksi tersebut yang sudah diatur berdasarkan sumber hukum yang ada yaitu QS al-Baqarah/2 : 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Dalam jual beli online yang dimana pihak penjual sebagai penyedia aplikasi disebut *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah di isi oleh pembeli disebut *qabul*. Setelah terjadinya akad pihak penjual dan pembeli melaksanakan dengan baik kewajibannya. Para ulama pun sepakat menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau penipuan dan juga selama adanya spesifikasi yang jelas terhadap objek maka transaksi tersebut diperbolehkan.
2. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam didalam kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan antar sesama. Untuk menilai aktivitas jual beli online harus dinilai apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak bisa dinilai dari konsep halal, tidak mengandung *gharar* didalamnya, maka syarat keabsahan tersebut sah dan tidak menyimpang menurut aturan yang ada. Sedangkan keabsahan jual beli online menurut Pasal 1320 KUH Perdata dinilai dari adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal dari perjanjian tersebut. Semuanya diatur agar transaksi jual beli online ini tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut aman tentram serta patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk menajdi bahan pertimbangan yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang

semakin tahun semakin canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung gharar atau penipuan didalamnya, dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut.

2. Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yusuf Abdullah. *Qur'an Terjemahan & Tafsirnya*. Cet 1: Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ardhinata, Ahliwan. "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik. *Jestt* 2, no. 1 (2015): h. 50-51.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bumi, Shinta Vinayanti. "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce", *Hukum Bisnis* 1, no. 3 (2013), h. 4.
- Cahyani, A. Intan, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Daulah* 5, no. 2 (2016): h. 312
- Dahlan, Abdul Azis, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3*. Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi V*. Cet 1: Jakarta PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Erliyani, Rahmida, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata", *Laporan Penelitian (Mandiri)* Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010, h. 24.
- Faulidi, Asnawi Haris. *Transaksi Bisnis E- Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Fitria, Nur Tira. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): h. 56-57.
- Gibtiah. *Fikih Kontenporer*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Halimah B, "Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir", *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018), h. 349-359.
- Hamsir, "Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah Dan Konvensional", *El-*

- Istiqhady 2, no. 2 (2020): h. 83.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Herniwati. "Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce), *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 4, (2015), h. 5.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Imran, Saiful. "Macam-Macam Metode Pembayaran Dalam Jual-Beli Online". *ipankint.com*. <https://ipankint.com/internet/bisnis-online/metode-pembayaran-jual-beli-online/> (di akses, 1 Februari 2018).
- al- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita". Semarang: CV Asy-Syifa. 1986.
- al- Jazari, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al- Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Terj. Qalbi Djabir, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Kau, Sofyan AP. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet", *Al-Mizan* 3, no. 1 Desember (2007): h. 1.
- Karim, Ardiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2012.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.
- Kuspriatni, Lista Kuspriatni. *Hukum Perjanjian*. Depok: Universitas Gunadarma, 2005.
- Marilang. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dalam Dari Perjanjian)*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Miru, Ahmadi, Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, *El-Istiqhady* 2, no. 2 (2020): h. 75
- Muhammad, Mahmudah Mulia, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020), h. 80-81.
- Miantari, Ni Kadek Diah. Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yulianti, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 2 (2018), h. 9.
- Misbahuddin. *E-Commerce Islam*. Cet: 1 Gowa: Alauddin University Press, 2012.
- Muhammad, Abu Ja’far. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dalam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Muslim, Abi al-Husain, bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Terj. Rohmad Arbi, Nur shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajriyah, *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- al-Naisaburi, Abi al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *At-Tajrid ash-sharib li Ahadits al-Jaami’ ash-shahib mukhtashar shahih muslim*. Terj. Abdurrahman Nuryaman, Mukhtashar Shahis Al-Bukhari. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Nisrina, Disa Nusia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi* Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2015

- Nugraha, Rifan Adi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online". *Serambi Hukum* 8, no. 2 (2014): h. 91-92.
- Nurmalia. "Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su-Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.
- Nurmasyithaziauddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online". *Petita* 2, no. 1 (2017): h. 107.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Putra, I Komang Mahesa, dkk. "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 75-76.
- Projodikoro Wijono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: PT. Sumur, 1991.
- Quthub, Sayyid. "*Tafsir Zhilalil Qur'an Jilid 2*". Terjemahan dalam Al-Qur'an. *Tafsir Fi Zhilalil Quran*. Jilid 2; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Arab*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah V*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*. Jakarta: Insan Kamil. 2013.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017), h. 379-384.
- Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sanusi, Arsyad. "Transaksi Bisnis Elektronik Commerce (e-commerce): Studi Tentang

- Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya” *Tesis Magister*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Sanusi, Nur Taufiq, Hadi Daeng Mapuna, Andi Nurhani Mufrih, “*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Iqtishaduna* 2 no. 2 (2020): h. 6.
- Saputra, Sena Lingga. “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019), h. 211-212.
- Sederet Kamus. Online Indonesian English Dictionary. *Sederet.com* <http://mobile.sederet.com/> (di akses, 5 Februari 2015).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Volume 1 & 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sohrah. “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): h. 162-163.
- Sohrah. “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”, *Al-Qadau* 1, no. 2 (2014): h. 79.
- Soimin, Soedharyono. *Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita, 1983.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sukananda, Satria, Wahyu Adi Mudiparwanto. “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020), h. 169.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Islam*. Jakarta: Guepedia, 2018.
- Susanti, Deery Anzar. ”Jual Beli Online Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020), h. 184.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian. *Ekonomi Islam* vol 8, no. 2 (2017): h. 181-182.

- Syafei, Rachmat. *Fqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet X: Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2016.
- Taufik, Nur. "Syariah: Antara Hukum Dan Moral", *Ar-Risalah* 20, no. 1 (2020), h. 90-91.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Triantika, Nafa Amelsi. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata", *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (Juni), h. 122.
- Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)", *Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): h. 132-133.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Wijaya, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Seni Hukum Perikatan*. Cet 1: Jakarta; PT Raja Grafindo, 2003.
- Yunus, Muhammad, Nadhirah Naimi. *Fiqh Muamalah*. Medan: CV Ratu Jaya, 2011.
- Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce* (Bandung: Mandar Maju, 2009.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- al-Zuhairi, Wahbah. *al-Tafsir, al-Munir fi al-Qidah wa as-syari'ah wa al-Manhaj* Jilid 3 Damaskus: Darul Fikri, 1991.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Indira Jamal, lahir di Makassar, 6 Juni 1998. Anak ke tiga dari empat bersaudara dan merupakan buah hati kasih sayang dari pasangan suami-istri Jamaluddin dan Halima. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SDN Karuwisi III Makassar, melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 17 Makassar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas SMAN 13 Makassar, dan melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Disela kesibukan mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018/2019, Muslimah LDF (Lembaga Dakwah Fakultas) *Ar-Royyan* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018/2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R